





### Plagiarism Scan Report

 <p><b>11%</b> Plagiarism</p>	 <p><b>0%</b> Exact Match</p>	 <p><b>89%</b> Unique</p>	<p>Words 178</p>
	 <p><b>11%</b> Partial Match</p>		<p>Characters 1383</p>
			<p>Sentences 8</p>
			<p>Paragraphs 21</p>
			<p>Read Time 1 minute(s)</p>
			<p>Speak Time 2 minute(s)</p>

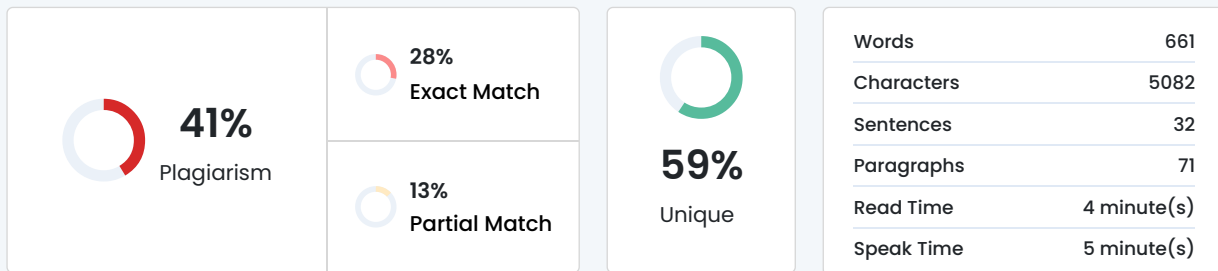
### Content Checked For Plagiarism

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP  
 PERTAMBANGAN PASIR TANPA IZIN DI KOTA  
 TERNATE  
 Nurhayati Chalil  
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  
 Email Korespondensi : atychalil27@gmail.com  
 Abstrak  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tambang pasir di Kota Ternate serta untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Penyelesaian Kasus Tambang pasir di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan Penelitian Empiris. **Data primer dan data sekunder sebagai data penunjang** penelitian diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis Kualitatif deskriptif. Hasil Instansi menunjukkan bahwa yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang tidak pernah melakukan pengawasan. Selain itu juga minimnya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.  
 Kata Kunci: Hukum Pidana; Pertambangan Pasir; Tanpa Izin

### Matched Source

**Similarity 17%**  
**Title:** [Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science, 9 ... - Unila](#)  
 menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer diperoleh secara langsung dari observasi langsung atau pengamatan dan pencatatan langsung tentang proses produksi seluruh produk dan keadaan di agroindustri Kopi Bubuk Cap Gunung Betung untuk menganalisis kinerja...  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/36399/1/5110-14697-1-PB.pdf>

### Plagiarism Scan Report



### Content Checked For Plagiarism

#### PENDAHULUAN

Pembangunan pada sektor lingkungan merupakan suatu pergerakan ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.<sup>1</sup> Dalam mengejar peningkatan kesejahteraan tersebut sering terjadi pacuan pertumbuhan yang sering kali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial, yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam, tanpa memperdulikan dampak terhadap lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah pengelolaan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, dan konflik sektor

<sup>1</sup> Mohamad Teja, (2015), *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1, Hlm. 21

55

pertambangan dengan sektor lainnya.<sup>2</sup> Demikian juga yang terjadi di Kota Ternate dan beberapa lokasi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu direspon oleh Pemerintah sebagai penerima amanah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang diharapkan tidak keluar dari prinsip – prinsip penyelenggaraan Pemerintah yang berdasarkan kepada hukum dan konstitusi yang berlaku. Untuk itu perlu perlindungan dan pengamanan yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi pada kepentingan alam (nature's interest oriented law)<sup>3</sup>.

Pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan yang telah diatur dan telah ditetapkan oleh Pemerintah pada standart Baku Mutu Lingkungan (BML)<sup>4</sup>

. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Pertambangan Pasir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan selanjutnya disebut dengan UU No. 11 Tahun 1967 dibagi atas bahan galian A (strategis), bahan galian B (vital), dan bahan Pasir (non strategis dan non vital). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut (UU Minerba) terdapat perubahan penggolongan bahan galian, sehingga bahan galian tidak lagi digolongkan menjadi A, B, dan C, melainkan menjadi mineral dan batubara.

Pertambangan mineral bukan logam adalah kelompok komoditas yang tidak termasuk mineral logam, batuan, maupun mineral energi lainnya. Contohnya pasir, marmer, batu kapur, tanah pasir, dan lain-lain.<sup>6</sup> Sedangkan Batuan meliputi : marmer, perlit, tanah serap (fullers earth), granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit,

tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkesikan, gamet, giok, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Kegiatan penambangan Pasir di Kota Ternate dimulai sejak tahun 2000 yang kemudian Pemerintah Kota Ternate masih mempergunakan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Pasir yang bertujuan untuk mengatur dan menertibkan kegiatan pertambangan. Sandaran perda ini adalah UU No 11 Tahun

2 Moeljatno. (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Bina Aksara, hlm. 24-25

3 R.M Gatot P. Soemartono, (1996), *Hukum Lingkungan Indonesia*, op. cit hal.25

4 Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup*.

5 Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

6 [http://fafageo.blogspot.com/2010/10/macam-macam-bahan-tambang\\_24.html](http://fafageo.blogspot.com/2010/10/macam-macam-bahan-tambang_24.html), Fajar Tri Kuncoro, *Macam – Macam Bahan Tambang*, diakses tanggal 5 Januari 2017

56

1967 Tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan. Seiring dengan perkembangan situasi saat ini dan tantangan dimasa depan dimana pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.<sup>7</sup> Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>8</sup>

## Matched Source

### Similarity 50%

**Title:** [eprints.ums.ac.id · 9406](https://eprints.ums.ac.id/9406) · **IUPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERTAMBANGAN LOKAL**

terjadi pacuan pertumbuhan yang sering kali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya

<https://eprints.ums.ac.id/9406/1/C100060013.pdf>

### Similarity 34%

**Title:** **PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP** - [metrouniv.ac.id](http://metrouniv.ac.id)

pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan...

<https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download/7374/3421>

### Similarity 17%

**Title:** [www.academia.edu](http://www.academia.edu) · 34989618 · **LEGAL\_OPINION\_KASUS (DOC) LEGAL OPINION KASUS PERTAMBANGAN EMAS ...** - *Acad*

Beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Untuk itu, perlu adanya penindakan oleh segenap k termasuk bidang penegakan hukum pidana.

[https://www.academia.edu/34989618/LEGAL\\_OPINION\\_KASUS\\_PERTAMBANGAN\\_EMAS\\_TANPA\\_IJIN\\_PETI\\_DI\\_SINGKAWANG](https://www.academia.edu/34989618/LEGAL_OPINION_KASUS_PERTAMBANGAN_EMAS_TANPA_IJIN_PETI_DI_SINGKAWANG)

### Similarity 12%

**Title:** **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEI**

Demikian juga pertambahan emas liar yang terjadi di Gunung Botak, Desa Dafa, Dusun Wamsaid, Kecamatan Waeapo, K ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi r [https://www.academia.edu/34840577/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DALAM\\_PERTAMBANGAN\\_EMAS\\_ILEGAL\\_BAGI\\_KELESTA](https://www.academia.edu/34840577/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_DALAM_PERTAMBANGAN_EMAS_ILEGAL_BAGI_KELESTA)

---

**Similarity 10%**

**Title:**[negara hukum indonesia](#)

by Z Ridlwan · 2011 · Cited by 216 — Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum. Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/56/57>

---

**Similarity 8%**

**Title:**[www.academia.edu · 94301894 · Hak\\_Gugat\\_Pemerintah Hak Gugat Pemerintah dalam Mengembalikan Kerugian dan](#)

Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang mem yang berorientasi kepada kepentingan alam (natures's interest oriented law).9 Hukum yang mengatur segi-segi lingkungan sistem.

[https://www.academia.edu/94301894/Hak\\_Gugat\\_Pemerintah\\_dalam\\_Mengembalikan\\_Kerugian\\_dan\\_Pemulihan\\_Ling](https://www.academia.edu/94301894/Hak_Gugat_Pemerintah_dalam_Mengembalikan_Kerugian_dan_Pemulihan_Ling)

---

**Similarity 6%**

**Title:**

[belajarpengendalianlingkungan.blogspot.com · 20224.1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup](#)

Apr 9, 2022 · Baku mutu lingkungan hidup, merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

<https://belajarpengendalianlingkungan.blogspot.com/2022/04/9-pencegahan-pencemaran-danatau.html>

---

**Similarity 6%**

**Title:**[Mengenal 12 Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup](#)

· Oct 13, 2022 · Baku Mutu Lingkungan Hidup, merupakan sebuah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suat sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/63486949c5f13/mengenal-12-instrumen-perlindungan-lingkungan-hidup>

---

**Similarity 4%**

**Title:**[PERBUP Kab. Luwu Timur No. 21 Tahun 2012](#)

... kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat tanah ...

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/111113/perbup-kab-luwu-timur-no-21-tahun-2012>

---

**Similarity 4%**

**Title:**[INFO](#)

Jenis\_ Tamb, Emas, Pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

[https://ppkl.menlhk.go.id/website/silat/frontend/polygon\\_detail/5015](https://ppkl.menlhk.go.id/website/silat/frontend/polygon_detail/5015)

---

**Similarity 4%**

**Title:**[repository.unissula.ac.id · 11858 · 2BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah](#)

3 Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana: Cetakan Pertama, Bina Aksara, Yogyakarta, halaman 24-25.

<http://repository.unissula.ac.id/11858/2/BAB%20I.pdf>

---

### Similarity 4%

**Title:**UU No. 32 Tahun 2009 - JDIH BPK RI

Kata "dapat" dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

---

### Similarity 3%

**Title:**Pertambangan Mineral Dan Batubara

... situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik ...

<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25347>

---

### Similarity 3%

**Title:**www.academia.edu · 121975045 · Implikasi\_UU\_No\_3Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas...

Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak seses strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.

[https://www.academia.edu/121975045/Implikasi\\_UU\\_No\\_3\\_Tahun\\_2020\\_Mengenai\\_Perubahan\\_Atas\\_Undang\\_Undang\\_](https://www.academia.edu/121975045/Implikasi_UU_No_3_Tahun_2020_Mengenai_Perubahan_Atas_Undang_Undang_)

---

### Similarity 3%

**Title:**IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, Batubara ...

dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonor lingkungan hidup, perkembangan ...

[http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful\\_resources/documents/regulations/Law%20No.4%20of%202009%20Mineral%20English\).pdf](http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/documents/regulations/Law%20No.4%20of%202009%20Mineral%20English).pdf)

---

### Similarity 3%

**Title:**PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN ...

by M Teja · 2015 · Cited by 114 — Pentingnya rencana yang matang dalam pembangunan menjadi prioritas utama untuk dilakukan agar peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat bisa lebih baik.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/463/360>

---

### Similarity 3%

**Title:**Rajawali Pers. Azmi Fendri, 2016, P - Scholar UNAND

Islam, Volume 3 Nomor 1. Mohamad Teja, 2015, "Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir", Jurnal Sekretariat Jenderal DPR RI, Volume 6.

<http://scholar.unand.ac.id/204743/4/Daftar%20Pustaka.pdf>

---

### Similarity 3%

**Title:**Essay Bab 1 Dan Bab 2 | PDF

... keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup 5. Jumran S (D121 11 255) 27. Sebutkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ...

<https://id.scribd.com/doc/142818033/Essay-Bab-1-Dan-Bab-2>

---

### Similarity 3%

**Title:**UU No. 11 Th 1967.pdf

BAHAN GALIAN. Pasal 3. (1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan: a. golongan bahan galian strategis; b. golongan bahan galian vital; c. golongan bahan ...

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2011%20Th%201967.pdf>

---

### Similarity 3%

**Title:**Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - UNBOR

alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan 5. Batubara meliputi bitumen padat, <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/download/629/595>

---

#### Similarity 3%

**Title:** PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ...

(laterit), batugamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/274294/PERDA%20NO%2010%20TH%202013.pdf>

---

#### Similarity 2%

**Title:**

[www.academia.edu/36959082/Hak\\_Penambangan\\_Pasir](http://www.academia.edu/36959082/Hak_Penambangan_Pasir) Hak Penambangan Pasir di Indonesia - Academia.edu

Hasni, hukum penataan ruang dan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali pers, jakarta, 2010, hal 432 Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratis. otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup,...

[https://www.academia.edu/36959082/Hak\\_Penambangan\\_Pasir\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/36959082/Hak_Penambangan_Pasir_di_Indonesia)

---

### Plagiarism Scan Report

<p><b>21%</b> Plagiarism</p>	<p><b>16%</b> Exact Match</p>	<p><b>79%</b> Unique</p>	<p>Words 923</p>
	<p><b>5%</b> Partial Match</p>		<p>Characters 6871</p>
			<p>Sentences 42</p>
			<p>Paragraphs 92</p>
			<p>Read Time 5 minute(s)</p>
			<p>Speak Time 7 minute(s)</p>

### Content Checked For Plagiarism

Perkembangannya aktifitas penambangan Pasir di Kota Ternate sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003, salah satu contoh di Kelurahan kalumata bagian barat masih banyak terdapat aktifitas tambang Pasir berupa pasir dan kerikil yang tidak memiliki izin, padahal sampai saat ini telah terjadi perluasan areal penambangan kurang lebih 20 Ha. Penambangan Pasir, berdasarkan keterangan penambang, bermula dilakukan di kelurahan Ngade dan Hi Akhmad kamaludin dan Hi Husen Tengku tercatat sebagai orang-orang awal dalam aktifitas penambangan tersebut. Diawal aktifitasnya para penambang ini masih menggunakan tenaga manusia dalam menambang dengan menggunakan peralatan manual seadanya (sekop, linggis, pacul dan sebagainya). Bahan galian yang diambil meliputi pasir dan tanah timbunan. Terhadap aktifitas penambangan tanpa izin tersebut ternyata tidak ada tindakan pemerintah maupun penegak hukum sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum. Sejak tahun tersebut sampai dengan saat ini, sebagian besar penambang sama sekali tidak mengantongi izin penambangan dari instansi terkait. Penambang pernah dipanggil oleh instansi terkait di Kantor Lingkungan Hidup yang saat itu dipimpin Sdr Husen Sarbin, dan hanya diarahkan agar tidak merusak lingkungan.

Ketentuan pidana sudah jelas diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 24 Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Pasir. Dalam pandangan penulis , jika antara tahun 2000 s.d tahun 2003 tidak ditemukan adanya izin bisa dimaklumi karena memang pada fase itu belum ada regulasi (perda) yang mengatur tentang ketentuan perizinan. Namun antara tahun 2003 sampai dengan saat ini dimana tidak ada satupun dokumen perizinan yang direkomendasikan, dari pemerintah kota Ternate khususnya instansi terkait.

Terhadap rekomendasi SPPL Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan UKL/UPL yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian oleh penambang digunakan sebagai izin bagi aktifitas penambangan adalah keliru. Karena SPPL atau UKL/UPL adalah salah satu dokumen lingkungan yang berdasarkan Perda No 11 tahun 2003 merupakan salah satu syarat bagi proses penerbitan Surat izin penambangan Daerah (SIPD).

**Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan jelas memberitahukan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.** Namun pada kenyataannya kegiatan pertambangan bahan Pasir

7 Samsul Hidayat, (2021), Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Guna Memberi Nilai Tambah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Regional Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

**8 Trias Nugraha, (2024), Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol. 1 Nomor 01.2024.1-8**

9 Nikita Dea Angelina, Putri Agustin, dll (2022) Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh 57

sengaja dibiarkan oleh Pemerintah daerah Kota Ternate maupun oleh aparat penegak

hukum yang telah terjadi hingga saat ini, mengakibatkan terjadi banyak kelalaian terhadap proses / tahapan penambangan dan pasca penambangan, yang mana salah satunya perubahan terhadap lingkungan disekitarnya dan infrastruktur jalan menjadi rusak karena dilewati oleh sejumlah truk yang bermuatan pasir, selain mengakibatkan pula polusi bagi masyarakat sekitar.

Terhadap permasalahan yang ada pada pertambangan tanpa izin ini, perlu dilakukan penegakan hukum dalam ruang lingkup hukum pidana sesuai asas ultimum remedium. Penyelesaian masalah kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin ini dilakukan dengan penerapan asas subsidiaritas yang merupakan asas hukum yang bersifat spesifik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu sarana terakhir bila sanksi yang lain tidak memadai.<sup>10</sup> Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk turut serta dalam penanganan kasus ini, khususnya penegakan hukum pidana dapat dilihat dari banyaknya kasus Pertambangan pasir tanpa izin di Kota Ternate. Uraian ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui mengapa instansi yang berwenang tidak melakukan tindakan terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate serta faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate.

#### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

Seyogyanya dalam sebuah implementasi hukum, maka hukum secara keseluruhan menjadi sumber utama dalam menentukan kesesuaian antara hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan kata lain bahwa penelitian ini lebih mengarah pada aspek fungsi dan tujuan dari penerapan hukum dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Ronny Soemitro menyatakan bahwa penelitian empiris akan identik dengan penelitian yang menggunakan data primer sebagai unsur utama dan pembeda dengan penelitian hukum lainnya atau dengan kata lain suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>11</sup> Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung pada sumber dengan metode wawancara yang kemudian didukung dengan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa literatur, literatur yang terkait, Peraturan Perundang-Undangan, Data resmi pemerintahan hingga pada landasan teori yang mendukung dalam menunjang hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data atas data-data yang diperoleh dilakukan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan fokus penelitian dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum

Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah. BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 03

10 Lidya Suryani Widayati, (2015), Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015: 1 - 24

11 Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, Dualisme Penelitian: Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta : Pustaka Pelajar , Hlm. 154

58

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## Matched Source

### Similarity 9%

**Title:**View of TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP ...

Tugas dan wewenang di bidang pengelolaan dan perlindungan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan ...

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29763/28824>

---

**Similarity 7%****Title:**[Enhancing Socio-Economic Dynamics: Assessing Regional ...](#)

Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. Trias ... Trias Nugraha. 03 May 2024. Save. Koherensi Pembangunan Lingkungan Yang ...

<https://discovery.researcher.life/article/enhancing-socioeconomic-dynamics-assessing-regional-governance-and-mining-community-benefits-post-law-number-3-of-2020-in-north-maluku/aa00db9fd56d3ee3bb3ab8f0c99694c4>

---

**Similarity 6%****Title:**[K02-Tahapan Kegiatan Pertambangan | PDF](#)

Teks tersebut membahas tahapan kegiatan pertambangan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu pra penambangan, penambangan, dan pasca penambangan.

<https://id.scribd.com/doc/270279924/k02-Tahapan-Kegiatan-Pertambangan>

---

**Similarity 8%****Title:****text-id.123dok.com · document · ky6pjke7qPelaksanaan Pidana strafmodus Latar Belakang Permasalahan**

Hukum pidana hanya dapat dipergunakan apabila sanksi lain telah diterapkan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku yang relatif besar atau menimbulkan keresahan masyarakat.

<https://text-id.123dok.com/document/ky6pjke7q-pelaksanaan-pidana-strafmodus-latar-belakang-permasalahan.html>

---

**Similarity 3%****Title:**[Hubungan Modal Sosial dengan Pendapatan Petani Sawi ...](#)

by A Habsari — Data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni data terkait informasi usahatani sawi bakso petani yang ...

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article/download/89860/49375>

---

**Similarity 3%****Title:**[Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di ...](#)

sumber dengan metode wawancara yang kemudian didukung dengan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa literatur ...

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/13489/8942/22370>

---

**Similarity 3%****Title:**[Implementasi Perlindungan Lingkungan maritim atas ...](#)

by F Fathurrahim · 2024 — pada landasan teori yang mendukung dalam menunjang hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data atas data-data yang diperoleh ...

<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/711/337/2156>

---

**Similarity 3%****Title:**[Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian](#)

Nov 22, 2022 — Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring ...

<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

---

**Similarity 3%****Title:**[www.academia.edu · 101378387 · ANALISIS\\_PERISTIWAANALISIS PERISTIWA KANJURUHAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM D](#)

Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digi Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data sekunder, peraturan hukum yang berkaitan deng permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang yang berkaitan dengan permasalahan ...

**Similarity 3%**

**Title:**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN ...

Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan Indonesian Journal of Law and Policy Studies | Volume 2 No. 1 Mei 2021

<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/download/4296/2544>

---

**Similarity 3%**

**Title:**BAB I PENDAHULUAN - UPNVJ

dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, dan data hasil wawancara. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk

<https://repository.upnvj.ac.id/15781/3/BAB%20I.pdf>

---

**Similarity 2%**

**Title:**Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum ...

Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 Nomor 02.2024. 88-96 89 dasar masyarakat. Mengacu dalam upaya pembangunan, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaanny...

<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/download/245/44/487>

---

**Similarity 2%**

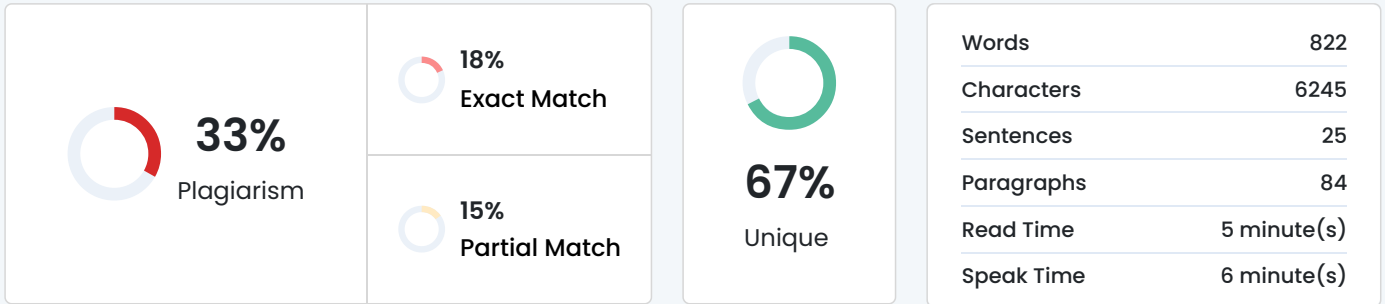
**Title:**metodologi riset hukum

by SS Nugroho · Cited by 22 — kedua-duanya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data se Penggunaan data primer dalam penelitian hukum.

[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METOD](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METOD)

---

### Plagiarism Scan Report



### Content Checked For Plagiarism

Penetapan/penentuan pedoman baku (standar) Standar yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan adalah sesuai dengan aturan normatif sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2017 tentang Pengelolaan Mineral Bukan Logan Dan Batuan Dalam aturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) kemudian memiliki kewajiban: menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara; melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Khusus mengenai daya dukung lingkungan, maka pengusaha pertambangan diwajibkan untuk mengurus Upaya Pengolahan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelestarian Lingkungan (UKL) dari Badan Lingkungan Hidup.<sup>16</sup> Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 pasal 17 dijelaskan bahwa pengawasan dapat berupa: evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK dan atau inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK Pengawasan ini dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Jika pengusaha pertambangan tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi pidana dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan dicabut. Pengukuran hasil Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah pengukuran hasil Pengukuran hasil ini dilakukan dengan inspeksi ke lokasi penambangan pasir. Berdasarkan keterangan Lurah dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertambangan dan Energi telah melaksanakan inspeksi ke Kota Ternate terkait penambangan pasir yang meresahkan masyarakat. Dari hasil inspeksi tersebut diperoleh hasil yakni terdapat penambangan pasir di dekat area rawan runtuhnya tanah. Selain daripada itu, penambangan pasir yang dilakukan di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara belum memiliki izin dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara. Setidaknya ada 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) lokasi penambangan pasir di Kota Ternate.

<sup>16</sup> HELMI, (2011), Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 1.

Perbandingan hasil nyata dengan pedoman baku

Setelah pengukuran hasil yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan antara aturan normatif sebagai dasar dari usaha pertambangan dengan fakta penambangan pasir di Kota Ternate. Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengawasan langsung oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: Kegiatan usaha penambangan pasir di Kota Ternate dilakukan tanpa izin dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan aturan setiap usaha pertambangan harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin ini bertujuan untuk legitimasi dari kegiatan pertambangan yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pendapatan negara; dan Penambangan pasir di area jembatan tidak sesuai dengan aturan wilayah usaha pertambangan yakni disesuaikan dengan aspek ekologi, aspek geografis dan aspek sosial budaya. Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdekatan dengan jembatan akan merusak konstruksi jembatan dan berakibat fatal bagi masyarakat setempat..

Tindakan koreksi/tindak lanjut

Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku Utara dalam inspeksi yang dilakukannya, maka dikeluarkan kebijakan berupa pelarangan bagi penambang pasir di sekitar area jembatan di Kota Ternate dan menginstruksikan kepada penambang pasir untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Namun dari tindak lanjut tersebut, sebagian kebijakan yang dipenuhi oleh penambang pasir yakni pindah dari lokasi pertambangan yang berdekatan dengan jembatan. Izin usaha sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan pertambangan sampai saat ini belum dilaksanakan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui Lurah dan penambang pasir diketahui bahwa yang menjadi penyebab mereka tidak mengurus izin tersebut disebabkan oleh rumitnya proses pengurusan izin. Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. seperti diatur dalam Pasal 5 UUPH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 UUPH Tahun 2009 yaitu: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia ; Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate, yang mana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup salah satunya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dampak Lingkungan Hidup. Namun, suatu usaha penambangan pastilah akan berdampak luas pada lingkungan disekitarnya apalagi jika usaha tersebut telah dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya dampak positif saja tetapi juga dampak negatif. Oleh karena itu diperlukan adanya tindakan yang dapat dipaksakan agar lingkungan tetap terlindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat penambangan.

## Matched Source

Similarity 50%

**Title: JDIH KESDM**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

<https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/2449/detail>

---

**Similarity 8%****Title: Study Cases – Kelompok 7 | PDF**

Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam aturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha ...

<https://id.scribd.com/document/733364379/Study-Cases-Kelompok-7>

---

**Similarity 17%****Title: Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018.pdf**

Pasal 6. Pemegang IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan sesuai dengan kegiatannya. BAB II.

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Peraturan%20Menteri%20ESDM%20Nomor%2026%20Tahun%202018.pdf>

---

**Similarity 15%****Title: Sumut Rumuskan Perbaikan Tata Kelola Tambang Bersama**

Jun 28, 2017 · Juga meningkatkan nilai tambah, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan harus terjaga baik.

<https://www.mongabay.co.id/2017/06/28/sumut-rumuskan-perbaikan-tata-kelola-tambang-bersama>

---

**Similarity 9%****Title: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ...**

a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK; dan latau b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 18

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%2055%20Thn%202010.pdf>

---

**Similarity 4%****Title: PENAMBANGAN BATU MARMER DI DESA BANJAR, KECAMATAN. PANGGUL, KABUPATEN ...**

pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>82</sup> Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut diatur dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009.

<https://adoc.pub/penambangan-batu-marmer-di-desa-banjar-kecamatan-panggul-kab.html>

---

**Similarity 5%****Title: (PDF) Digawe PDF | ica ntik**

... salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. seperti diatur dalam Pasal 5 UUPPLH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 ...

[https://www.academia.edu/33840563/Digawe\\_PDF](https://www.academia.edu/33840563/Digawe_PDF)

---

**Similarity 5%****Title: Short Brief: Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang ...**

May 14, 2016 · Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

<https://dep.blogspot.com/2016/05/short-brief-pasal-65-undang-undang-no.html>

---

### Similarity 3%

**Title:**[Jaminan Akses Informasi, Partisipasi dan Keadilan Lingkungan ...](#)

Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

[Check](#)

---

### Similarity 3%

**Title:**[Hak dan Kewajiban Terhadap Lingkungan - Kompas.com](#)

Apr 6, 2021 · Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang...

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/06/183450869/hak-dan-kewajiban-terhadap-lingkungan>

---

### Similarity 3%

**Title:**[Materi Kelas 6 SD: Apa Saja Hak Warga Negara Terhadap ...](#)

Mar 24, 2022 — Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap warga ...

<https://kids.grid.id/read/473200038/materi-kelas-6-sd-apa-saja-hak-warga-negara-terhadap-lingkungan?page=all>

---

### Similarity 3%

**Title:**[DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ...](#)

Aug 26, 2020 — peraturan perundang-undangan” dan “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ...

[https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/FINAL\\_Rilis\\_Pers-Pelatihan\\_Pendampingan.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/FINAL_Rilis_Pers-Pelatihan_Pendampingan.pdf)

---

### Similarity 3%

**Title:**[Amdal Pertambangan | PDF](#)

karena itu diperlukan adanya tindakan yang dapat dipaksakan agar lingkungan tetap terlindungi dari pencemaran dan kerusakan akibat penambangan. Sebernarnya

<https://id.scribd.com/document/541559029/AMDAL-PERTAMBANGAN>

---

### Similarity 3%

**Title:**[pemerintah provinsi maluku](#)

Nov 18, 2014 — 8. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang selanjutnya disingkat ESDM adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Maluku. 9. Kas ...

<https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/11/18-PERDA-MINERBA.pdf>

---

### Similarity 2%

**Title:**[PP No. 55 Tahun 2010 - JDIH BPK RI](#)

2010: Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN. 2010 No. 85, TLN No. 5142, LL SETNEG : 17 HLM: Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5077/pp-no-55-tahun-2010>

---

### Similarity 2%

**Title:**(DOC) izin pertambangan | egi fitrah - Academia.edu

Yakni sebagai berikut: Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Mematuhi batas toleransi daya...

[https://www.academia.edu/19825072/izin\\_pertambangan](https://www.academia.edu/19825072/izin_pertambangan)

---

### Similarity 2%

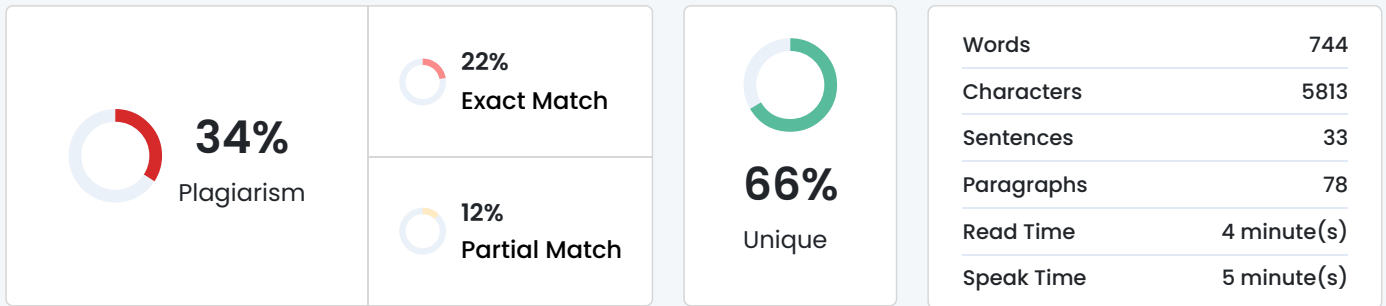
**Title:**implementasi pengawasan usaha pertambangan komoditas ...

by H Al-Banna · 2023 — Sumber data primer diperoleh dari lapangan yang terkait dengan pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan oleh Dinas Energi dan. Sumber Daya Mineral di ...

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/40866/30603>

---

### Plagiarism Scan Report



### Content Checked For Plagiarism

Sebenarnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan sudah diatur dalam UUPH Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka (2) yang dimaksud pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>17</sup> Sedangkan untuk pengertian pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka (2) yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>18</sup>

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum bukan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang luas meliputi preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya), represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum.<sup>19</sup>

Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan penambangan yang tidak memiliki izin maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate melakukan penyegelan tempat usaha penambang yang tidak memiliki izin pertambangan. Dalam hal penerapan perizinan tambang peneliti ingin mengutip hasil wawancara dengan Yulia Sulthana<sup>20</sup> dalam penjelasannya: "Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SIPD dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Namun fakta dilapangan pemilik tambang telah melakukan penambangan sebelum mendapatkan SIPD tersebut, setelah mendapat kan peringatan dan teguran dari pihak yang berwenang baru para penambang mengurus surat izinnya".

Untuk memperbaiki kondisi lahan setelah dilakukan penambangan oleh para penambang Pemerintah Daerah Kota Ternate khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate mewajibkan kepada para penambang untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang. Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat berfungsi kembali secara optimal. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Yulia Sulthana<sup>21</sup> yang menjelaskan bahwa: "Dalam melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat pada sasaran. Perencanaan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan karena telah diatur dalam dokumen

lingkungan. Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, sosial/lingkungan dan kelembagaan. Aspek teknis dapat dilihat dari sifat fisik dan kimia tanah, aspek lingkungan dilihat dari dampak

17 H.M. Erham Amin, (2015), Proses Penegakan Hukum Dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2, Hlm. 2

18 Shira Than, (2017), Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Warta Edisi : Hlm. 51

19 Serlika Aprita. Hasanul Mulkan,dll, (2024), Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No.1

20 Hasil wawancara dengan Yulia Sulthana selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 11 Oktober 2016

21 Hasil wawancara dengan Yulia Sulthana selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 11 Oktober 2016

62

penambangan pasir terhadap sosial masyarakat, aspek ekonomi dari produktivitas lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan.

Kegiatan reklamasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Dalam tahap eksplorasi maka pemegang izin usaha pertambangan harus melakukan rencana reklamasi wajib memenuhi prinsi-prinsip pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan prinsip konservasi mineral sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian diatas menurut hemat penulis tidak dilakukannya tindakan terhadap penambang pasir tanpa izin oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate karena sedari awal sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Hal ini disebabkan dalam proses pengurusan perizinan Dinas Lingkungan Hidup tidak langsung meninjau ke lokasi yang di jadikan area penambangan sehingga menyebabkan luas area penambangan yang tertera di dalam surat izin tidak sesuai dengan yang sebenarnya dilapangan.

Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Dari hasil pengawasan tersebut kemudian ditemukan banyak penambang-penambang liar yang belum memiliki izin namun yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas melakukan teguran padahal seharusnya ada upaya penindakan berupa penegakan hukum pidana hanya saja selama ini tidak pernah ada tindakan hukum khususnya upaya pemidanaan bagi para penambang pasir tanpa izin.

Upaya penegakan hukum terhadap penambangan galian golongan c tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain atruran hukum yang mengatur, aparat penegak hukumnya dan budaya hukum masyarakat, yang selanjutnya akan penulis uraikan satu persatu dibawah ini.

## Matched Source

### Similarity 50%

#### Title: [Pengertian dan Tujuan Lingkungan Hidup menurut UU](https://www.seputargeografi.com/2019/07/pengertian-dan-tujuan-lingkungan-hidup.html)

Jul 15, 2019 · Pengertian pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No.23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

<https://www.seputargeografi.com/2019/07/pengertian-dan-tujuan-lingkungan-hidup.html>

### Similarity 34%

**Title:**[www.kompas.com · skola · read](http://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009)Isi Aturan tentang Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009

Mar 17, 2021 · "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,...

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/17/142637069/isi-aturan-tentang-lingkungan-hidup-uu-no-32-tahun-2009>

---

### Similarity 15%

**Title:**[Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Masyarakat Adat ...](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/download/2053/pdf)

Oct 31, 2024 — Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan ...

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/download/2053/pdf>

---

### Similarity 10%

**Title:** [\(PDF\) USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM](https://www.academia.edu/35582684/USAHA_PELESTARIAN_LINGKUNGAN_DALAM)

... bersangkutan dengan hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang luas meliputi preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya) ...

[https://www.academia.edu/35582684/USAHA\\_PELESTARIAN\\_LINGKUNGAN\\_DALAM](https://www.academia.edu/35582684/USAHA_PELESTARIAN_LINGKUNGAN_DALAM)

---

### Similarity 10%

**Title:** [\(PDF\) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP](https://www.academia.edu/40692172/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP)

... berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual ...

[https://www.academia.edu/40692172/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_PIDANA\\_TERHADAP](https://www.academia.edu/40692172/PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP)

---

### Similarity 8%

**Title:**[USAHA PERTAMBANGAN – BAHAN GALIAN GOLONGAN C](https://jdih.mimikakab.go.id/common/dokumen/2007pd9109006ab.pdf)

bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C. Eksplorasi adalah penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya dan sifat letakan bahan

<https://jdih.mimikakab.go.id/common/dokumen/2007pd9109006ab.pdf>

---

### Similarity 6%

**Title:**[ajiscfld.blogspot.com · 2013 · 01](https://ajiscfld.blogspot.com/2013/01/reklamasi-lingkungan-pertambangan-batubara-tri-aji-blogger)Reklamasi Lingkungan Pertambangan Batubara | TRI AJI - Blogger

Jan 22, 2013 · Reklamasi merupakan suatu proses perbaikan pada suatu daerah tertentu (lahan bekas tambang) sebagai akibat dari kegiatan penambangan sehingga dapat berfungsi kembali secara optimal. Dalam melaksanakan reklamasi diperlukan perencanaan yang matang agar tepat pada sasaran.

<https://ajiscfld.blogspot.com/2013/01/reklamasi-lingkungan-pertambangan.html>

---

### Similarity 10%

**Title:**

[adoc.pub · perizinan-tambang-galian-c-dalam](https://adoc.pub/perizinan-tambang-galian-c-dalam-perizinan-tambang-galian-c-dalam-tinjauan-fiqh-al-biah-studi)PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DALAM TINJAUAN FIQH AL-BIAH (Studi ...

Perencanaan reklamasi harus sudah dipersiapkan sebelum kegiatan penambangan karena telah diatur dalam dokumen lingkungan. Dalam reklamasi lahan akibat penambangan harus melihat dari empat aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi, sosial/lingkungan dan kelembagaan.

### Similarity 5%

#### Title:PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA ...

by HME Amin · 2015 · Cited by 13 — Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember 2015, hlm. ... Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. H.M. Erham Amin. | 177 |.

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1453/915>

---

### Similarity 4%

#### Title:Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial

by HSD Kospa · 2021 · Cited by 2 — Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi, fisik lingkungan ...

<https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/TG/article/download/1909/1463/4935>

---

### Similarity 4%

#### Title:MANAJEMEN REKLAMASI KAWASAN PERTAMBANGAN ...

Jul 3, 2012 — ... lahannya. Sedangkan aspek kelembagaan dilihat dari fungsi dan peran masing-masing institusi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan.

<https://usantoso.wordpress.com/2012/07/03/manajemen-reklamasi-kawasan-pertambangan-sebagai-salah-satu-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-di-tinjau-dari-aspek-lingkungan-oleh-fera-a-pulungan-75-abstrak-penambangan-batubara-di-indonesia-p>

---

### Similarity 3%

#### Title:Mengenal Pertambangan Terbuka, Metode serta Dampaknya

May 24, 2024 — Pertambangan terbuka memerlukan area yang luas untuk operasi penambangan, termasuk penggalian, pemrosesan, dan penimbunan limbah tambang. Ini ...

<https://synapsis.id/pertambangan-terbuka-metode-dampak.html>

---

### Similarity 3%

#### Title:(PDF) Digawe PDF | ica ntik

[https://www.academia.edu/33840563/Digawe\\_PDF](https://www.academia.edu/33840563/Digawe_PDF)

---

### Similarity 3%


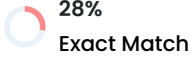

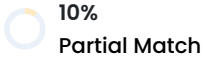
#### Title:cara mudah pahami pengadaan tanah untuk pembangunan ...

by JW MULIAWAN · 2018 · Cited by 19 — Pengadaan tanah didasarkan atas adanya kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan.

<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/82/10>

---

### Plagiarism Scan Report

 <p><b>38%</b> Plagiarism</p>	 <p><b>28%</b> Exact Match</p>	 <p><b>62%</b> Unique</p>	<p>Words 901</p>
	 <p><b>10%</b> Partial Match</p>		<p>Characters 6746</p>
			<p>Sentences 32</p>
			<p>Paragraphs 92</p>
			<p>Read Time 5 minute(s)</p>
			<p>Speak Time 7 minute(s)</p>

### Content Checked For Plagiarism

#### Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Terhadap Penambang Pasir Tanpa Izin

Berbicara penegakan hukum tentunya menjadi penting adalah bagaimana norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi fondasi bagi penegak hukum dan bertindak, jika norma hukum itu baik maka tentunya dalam pelaksanaannya tidak akan ada penentangan dari masyarakat. Begitupun sebaliknya dengan aparat hukum, sedemikian baiknya suatu aturan tentu digantungkan pada aparat yang menerapkan, jika aturan baik namun pelaksana aturan itu tidak baik maka apa arti peraturan itu. Hal sama penting adalah bagaimana penerimaan masyarakat dalam kesehariannya, terkadang suatu aturan sangat baik, ditopang oleh aparat yang baik pula, namun masyarakat tidak menunjungnya dengan pola pikir dan tindak perilaku.

Penegakan hukum terhadap terhadap penambang pasir tanpa izin tidak terlepas dari tiga unsur/teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang dikenal dengan istilah Three Elements of Legal System; yang pada intinya menyebut bahwa Suatu sistem hukum akan berjalan dengan baik apabila didalamnya terdapat unsur Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis akan menguraikan ketiga faktor penentu efektif atau tidaknya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin, sebagai berikut:

63

#### Aturan

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana disini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui atau terjadi suatu peristiwa terlebih dahulu.<sup>22</sup> Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya", system ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang disebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).<sup>23</sup>

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dasar-dasar hukum yang menjadi payung hukum di dalam penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin, yakni ada beberapa Undang-undang serta peraturan menteri yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin yang terjadi di negara ini. Dalam konteks pertambangan pasir ini undang-undang serta aturan terkait lainnya ialah sebagaimana berikut; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Eksistensi penambang tanpa izin dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Konflik norma terkait kewenangan perizinan yaitu dengan tidak adanya kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/ walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Namun, atas peralihan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peralihan kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Konflik norma antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemda mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah. Walaupun dalam 407 UU Pemda mengatur bahwa pada saat Undang-Undang Pemda mulai berlaku, semua peraturan

22 Fernando Dacosta, Acasio Fernandes, dll (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Di Pasar Manleuana Kota Dili Timor Leste Berdasarkan Decretio-Lei 26/2012, *Ganesha Law Review*, Volume 6 Issue 1, Hlm. 12

23 Hasaziduhu Moho, (2019), Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi* , Vol. 3 Nomor 2, Hlm.59. 64

perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemda. Namun praktiknya, perubahan kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan menimbulkan potensi penambang tanpa izin.

Dalam Undang-Undang Pemda diatur bahwa kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur, namun secara geografis banyak wilayah di Indonesia yang untuk menjangkau ibukota provinsi sangat sulit. Bila dahulu berdasarkan Undang-Undang Minerba IUP mineral buka logam dan IUP batuan serta IPR permohonannya diajukan ke bupati/walikota, namun sekarang sesuai Undang-Undang Pemda permohonannya harus diajukan ke gubernur. Sebagai ilustrasi yaitu permohonan IUP Batuan di lokasi pertambangan Kota Ternate yang dahulu cukup diajukan di Kota Ternate, namun sekarang harus diajukan ke ibukota provinsi Maluku Utara. Tentu sebagai daerah kepulauan, proses pengajuan izin tersebut tidak efektif dan efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Akhirnya, penambang memilih untuk tidak mengajukan izin usaha.

Termasuk mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, saat ini beralih ke pemerintah provinsi yang berakibat jauhnya rentang pembinaan dan pengawasan sehingga berpengaruh pada rentannya penambang tanpa izin. Belum lagi masalah pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam Undang-Undang Pemda mengenai hal tersebut tidak diatur bahwa kewenangan perizinan baru yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi berpengaruh pula pada pajak daerah dari atas operasi produksi izin yang diterbitkan. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak mineral bukan logam dan batuan berada di kabupaten/kota. Hal ini menjadi pemicu penambang tanpa izin

## Matched Source

### Similarity 28%

Title:1199 JISOS Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2, No.1, Februari 2023 ...

by F Fathurrahim · 2023 — sedemikian baiknya suatu aturan tentu digantungkan pada aparat yang menerapkan, jika aturan baik namun pelaksana aturan itu tidak baik maka apa arti ...

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/download/4802/3528>

**Similarity 13%****Title:**[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ...](#)

by S Saraya · 2022 · Cited by 3 — penambang pasir tanpa izin dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin guna tegaknya atau fungsinya norma ...

<https://jfh.uniss.ac.id/index.php/home/article/download/13/12>

---

**Similarity 28%****Title:**[Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman](#)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah " produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih...

<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman>

---

**Similarity 9%****Title:**[Setelah mempelajari tentang asas legalitas pada hukum pidana - Studocu](#)

RUU KUHP yang terbaru juga tetap mempertahankan asas legalitas seperti yang terdapat dalam KUHP yang lama. Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP juga menyatakan bahwa "Tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, kecuali jika perbuatan itu diatur dalam undang-undang yang ada sebelum...

<https://www.studocu.com/id/messages/question/10276250/setelah-mempelajari-tentang-asas-legalitas-pada-hukum-pidana-diskusikanlah-bagaimana-asas-legalitas>

---

**Similarity 8%****Title:**[kelemahan teori sistem hukum menurut](#)

by SS Suyatno · 2023 · Cited by 8 — dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Bagi yang melanggar ...

<https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/download/447/279>

---

**Similarity 6%****Title:**

[www.academia.edu](http://www.academia.edu) · 34996829 · [TEORI\\_ SISTEM\\_ HUKUM](#) [TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN](#) - [Academia.edu](#)

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak...

[https://www.academia.edu/34996829/TEORI\\_ SISTEM\\_ HUKUM\\_ LAWRENCE\\_ M\\_ FRIEDMAN](https://www.academia.edu/34996829/TEORI_ SISTEM_ HUKUM_ LAWRENCE_ M_ FRIEDMAN)

---

**Similarity 5%****Title:**[Dokumen Rencana Reklamasi: Pt. Putra Labuan Sulawesi](#)

Peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ...

<https://pdfcoffee.com/dokumen-rencana-reklamasi-pt-putra-labuan-sulawesi-pdf-free.html>

---

**Similarity 5%****Title:**[Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan DI Kota Samarinda](#)

Pengaturan Hukum (Regulatory Chain) Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

[https://www.academia.edu/67877052/Pengaturan\\_Hukum\\_Pengelolaan\\_Pertambangan\\_Batubara\\_Secara\\_Berkelanjut](https://www.academia.edu/67877052/Pengaturan_Hukum_Pengelolaan_Pertambangan_Batubara_Secara_Berkelanjut)

---

**Similarity 5%****Title:**[PP No. 23 Tahun 2010 - JDIIH BPK RI](#)

PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5031/pp-no-23-tahun-2010>

---

**Similarity 4%****Title:**[Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010](#)

· Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 ini ditetapkan dengan ...

[Check](#)

---

**Similarity 4%****Title:**[JDIH KESDM](#)

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

<https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/159/detail>

---

**Similarity 4%****Title:**[PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG ... - Neliti](#)

Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, sedangkan di Kabupaten Cilacap diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Retribusi Penggantian Biaya...

<https://media.neliti.com/media/publications/163511-ID-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-7.pdf>

---

**Similarity 4%****Title:**[Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis Oleh](#)

Kasus yang cukup aktual terkait dengan kewenangan kepolisian memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum yaitu terkait tidak adanya izin keramaian ...

[https://repository.unsri.ac.id/25298/1/Perizinan\\_Dalam\\_Kerangka\\_Negara\\_Hukum\\_Demokratis.pdf](https://repository.unsri.ac.id/25298/1/Perizinan_Dalam_Kerangka_Negara_Hukum_Demokratis.pdf)

---

**Similarity 3%****Title:**[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN ...](#)

by F Dacosta · 2024 — PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PASAR MANLEUANA KOTA DILI TIMOR LESTE BERDASARKAN DECRETIO-LEI 26/2012. Ganesha Law Review ...

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/3399>

---

**Similarity 3%****Title:**

[jdih.bappenas.go.id · data · abstrak](#)[PEMERINTAHAN DAERAH UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ...](#)

undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini; - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-

[https://jdih.bappenas.go.id/data/abstrak/UU\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_20141.pdf](https://jdih.bappenas.go.id/data/abstrak/UU_Nomor_23_Tahun_20141.pdf)

---

**Similarity 6%****Title:**[\(PDF\) JURNAL VOLUME 5 NO 3 FINAL PROTECT](#)

Termasuk mengenai kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dulu dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, saat ini beralih ke pemerintah provinsi yang berakibat ...

[https://www.academia.edu/35159665/JURNAL\\_VOLUME\\_5\\_NO\\_3\\_FINAL\\_PROTECT](https://www.academia.edu/35159665/JURNAL_VOLUME_5_NO_3_FINAL_PROTECT)

---

**Similarity 2%****Title:**[UU No. 28 Tahun 2009 - JDIH BPK RI](#)

Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang...

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

---

**Similarity 2%**

**Title:** DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN ...





by A Redi · 2016 · Cited by 66 — 2) Konflik Norma UU Minerba dengan UU. Pemda. Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh faktor konflik norma antara UU Minerba dan. UU Pemda, khususnya ...

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2002528>

---

Check By:  Dupli Checker

### Plagiarism Scan Report

 <p><b>22%</b> Plagiarism</p>	 <p>16% Exact Match</p>	 <p><b>78%</b> Unique</p>	<p>Words 929</p>
	 <p>6% Partial Match</p>		<p>Characters 7220</p>
			<p>Sentences 23</p>
			<p>Paragraphs 99</p>
			<p>Read Time 5 minute(s)</p>
			<p>Speak Time 7 minute(s)</p>

### Content Checked For Plagiarism

#### Penegak Hukum

Proses penegakan hukum, salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.<sup>24</sup> Kompetensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum dibidang lingkungan hidup menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kompetensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, maka tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate didukung oleh sumber daya aparatur yang mana berjumlah 134 orang dengan Strata Pendidikanya 114 orang SMA, 18 orang S1, 2 orang S2 dan dan 1 orang yang memiliki sertifikat Teknis.<sup>25</sup> Dengan jumlah sumber daya manusia yang masih mini dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terutama dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal teknis Dinas Lingkungan Hidup sendiri merasa sulit untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian

24 Muhammad Adam HR, (2017), Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal JISH, Vol 3

25 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate

65

peneliti ketika Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate diminta oleh masyarakat sekitar pertambangan untuk menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kota Ternate ini yang menjadi kesulitan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang mana Dinas Lingkungan Hidup yang mana hanya memiliki 1 ahli pemeriksa teknis sedangkan untuk PPNS belum dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dari unsur pidananya.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti katakan bahwa, masalah sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate perlu ditingkatkan untuk mengaplikasikan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

Ketersediaan personil dan sumberdaya manusia selayaknya perlu untuk dievaluasi, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan lingkungan hidup, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate kepada dunia pendidikan sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tindak pidana lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Kota Ternate, memiliki anggota-anggota dibawah Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan. Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan pengemban

fungsi pemeriksa dan PPNS yang bertugas melakukan Penyidikan tindak pidana lingkungan. Mekanisme pelaksanaan penyidikan oleh Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan yang merupakan sub sistem peradilan pidana selalu bekerja sama dengan sub sistem peradilan pidana lainnya yaitu polisi, kejaksaan dan kehakiman, meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem.

Menurut Mansur Abd Rahman<sup>26</sup> dalam penjelasannya mengenai peningkatan kemampuan yang menjabarkan bahwa: "Peningkatan kemampuan terhadap personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, khususnya dibidang Seksi Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan sangat diperlukan guna memperbaiki sumber daya manusia serta meningkatkan profesionalisme kerja anggota. Peningkatan kemampuan anggota tersebut didapat dengan pendidikan kejuruan lingkungan hidup dan PPNS, untuk Pengatur Muda TK I sampai seterusnya, selama 2-3 bulan yang dilaksanakan di Balai Diklat Lingkungan Hidup, atau dengan pelatihan-pelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara). Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar anggota terampil dan profesional dalam melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana lingkungan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan"

Menurut penulis profesionalisme Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate saat ini memang perlu untuk dievaluasi, karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate belum mampu bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekati Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate kepada dunia pendidikan baik itu

26 Hasil wawancara dengan Muhammad Syafei, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, pada tanggal 11 Oktober 2024

66

formal maupun teknis sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesional adalah pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, maka diharapkan semakin profesional Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate tersebut.

Pendidikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate sungguh penting karena memberi ilmu dan pengetahuan untuk mempengaruhi dan membentuk sikap serta memberikan keterampilan. Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas lingkungan hidup dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate modern sesuai dengan tuntutan masyarakat modern masa kini.

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala berikutnya yang menghambat profesionalisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate adalah soal rekrutmen atau penerimaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate yang masih berasal dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, dalam melaksanakan tugasnya output dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate harus memiliki kompetensi yang sepadan dengan aktor, aktor penegak hukum lainnya dari kejaksaan dan kehakiman dengan input dari sarjana hukum mengingat Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate adalah pejabat pemerintah yang di beri kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan SDA di bidang pertambangan Pasir dan batuan sesuai dengan asas-asas yang terkandung Dengan menerapkan peningkatan standar input rekrutmen menjadi sarjana hukum dan non-hukum. ini diharapkan dapat berimplikasi kepada terwujudnya penegakan hukum yang demokratis, yaitu penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum secara selaras.

**Similarity 50%****Title:Peran Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Diversi ...**

by A Purnawati · 2021 — Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian.

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/1876/1597>

---

**Similarity 7%****Title:PERWALI Kota Ternate No. 5 Tahun 2021**

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate · MATERI POKOK PERATURAN.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195660/perwali-kota-ternate-no-5-tahun-2021>

---

**Similarity 6%****Title:Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Jurnal**

by S Sriyanti · 2023 · Cited by 7 — Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap ...

<https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/download/1327/1097>

---

**Similarity 3%****Title:PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA**

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup h. menghentikan penyidikan;

<http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/artikel-umum/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>

---

**Similarity 3%****Title:Wali Kota Ternate Beri Sinyal Evaluasi Jajarannya**

Jan 12, 2024 — ... Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Ternate, Tony S. ... dievaluasi sebagai langkah Pemerintah Kota Ternate ... "Memang perlu ...

<https://indotimur.com/ternate/wali-kota-ternate-beri-sinyal-evaluasi-jajarannya>

---

**Similarity 7%****Title:REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SINERGITAS ... - Neliti**

bekerja secara profesional, dalam artian meningkatkan kemampuan dalam menangani pekerjaan kepolisian, dan yang dapat dilakukan dengan cara mendekati polisi

<https://media.neliti.com/media/publications/147566-ID-none.pdf>

---

**Similarity 3%****Title:Eksistensi Syahbandar dalam Penegakan Hukum Pelayaran ...**

by F Fathurrahim · 2019 — itu formal maupun teknis sebagai sumber untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan ...

<https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/klij/article/download/1903/1457>

---

**Similarity 3%****Title:REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SINERGITAS ... - Neliti**

tertentu, diperoleh melalui pendidikan tertentu dilaksanakan sesuai kode etik, ada sistem penggajian, ada sistem rekrutmen dan bermanfaat untuk kemanusiaan (Legge dan Exley, 1975: 51). Dengan demikian semakin tinggi pendidikan polisi, maka diharapkan semakin profesional polisi tersebut. Pendidikan bagi polisi sungguh...

<https://media.neliti.com/media/publications/4325-ID-revitalisasi-sumber-daya-manusia-polri-untuk-sinergitas-kinerja-dalam-integrated.pdf>

---

**Similarity 3%**

**Title:**DLH Kota Ternate Gencar Sebarkan Edukasi Pengelolaan ...

Aug 7, 2023 — RAKYATMU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Maluku ... sangat penting di dalam pencapaian target reduksi sampah di Kota Ternate.

<https://www.rakyatmu.com/daerah/dlh-kota-ternate-gencar-sebarkan-edukasi-pengelolaan-sampah-organik>

---

**Similarity 3%**

**Title:**Makara Human Behavior Studies in Asia – UI

menjelaskan bahwa, "Setidaknya ada dua kendala serius yang menghadang profesionalisme polisi yaitu lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian dan lemah dalam manajerial, yang mana keduanya merupakan prasyarat penting dalam operasionalisasi kepolisian modern sesuai dengan tuntutan...

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1443&context=hubsasia>

---

**Similarity 4%**

**Title:**revitalisasi sumber daya manusia polri untuk sinergitas kinerja ...

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan manajerial, termasuk ketajaman dan kepekaan menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan. Kendala ...

<https://kudo.tips/edoc/revitalisasi-sumber-daya-manusia-polri-untuk-sinergitas-kinerja-dalam-integrated-criminal-justice-system.html>

---

**Similarity 2%**

**Title:**REVITALISASI-SUMBER-DAYA-MANUSIA-POLRI-UNTUK- ...

diarahkan pada fungsi yang diemban sebagai penyidik. Sinkronisasi peserta didik dengan menerapkan peningkatan stan

[https://www.researchgate.net/profile/Dian-Agung-](https://www.researchgate.net/profile/Dian-Agung-Wicaksono/publication/324237942_REVITALISASI_SUMBER_DAYA_MANUSIA_POLRI_UNTUK_SINERGITAS_KINERJA_DALAM_IN)

[Wicaksono/publication/324237942\\_REVITALISASI\\_SUMBER\\_DAYA\\_MANUSIA\\_POLRI\\_UNTUK\\_SINERGITAS\\_KINERJA\\_DALAM\\_INSUMBER-DAYA-MANUSIA-POLRI-UNTUK-SINERGITAS-KINERJA-DALAM-INTEGRATED-CRIMINAL-JUSTICE-SYSTEM.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dian-Agung-Wicaksono/publication/324237942_REVITALISASI_SUMBER_DAYA_MANUSIA_POLRI_UNTUK_SINERGITAS_KINERJA_DALAM_INSUMBER-DAYA-MANUSIA-POLRI-UNTUK-SINERGITAS-KINERJA-DALAM-INTEGRATED-CRIMINAL-JUSTICE-SYSTEM.pdf)

---

**Similarity 2%**

**Title:**LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA – DDI POLMAN

tidaknya proses penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (Soekanto, 1983: 5). Kompetensi polisi sebagai pintu gerbang proses penegakan hukum menjadi tumpuan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi...

<https://www.ejournals.ddipolman.ac.id/index.php/jish/article/download/16/10>

---

**Similarity 2%**

**Title:**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM ...

by MR RIDWAN · 2023 · Cited by 1 — Tujuan : penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkunga Hidup Kota ... dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Ternate.

<http://eprints.ipdn.ac.id/14372/1/RESUME.pdf>

---

**Similarity 2%**

**Title:**tesis

pelatihan penyidikan yang sering dilakukan di SPN (Sekolah Polisi Negara). Singaraja. Sedangkan tujuan dari kejuruan maupun pelatihan tersebut adalah agar.

<https://adoc.pub/download/implementasi-tugas-dan-wewenang-penyidik-terhadap-perlindung.html>

---

### Plagiarism Scan Report

<p><b>43%</b> Plagiarism</p>	<p><b>40%</b> Exact Match</p>	<p><b>57%</b> Unique</p>	Words	846
	<p><b>3%</b> Partial Match</p>		Characters	6327
			Sentences	36
			Paragraphs	85
			Read Time	5 minute(s)
			Speak Time	6 minute(s)

### Content Checked For Plagiarism

**Budaya**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>27</sup> Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem

<sup>27</sup> Syafruddin Makmur, (2015), Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’l, Vol. II No. 2, Hlm. 32  
67

nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, “the moral of the man”.<sup>28</sup> Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.<sup>29</sup> Apalagi masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur fitrah sejak lahir bagi seorang manusia.<sup>30</sup> Disinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena persfektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang merupakan ide-ide untuk mewujudkan dan menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih

baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapainya budaya hukum yang baik, begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Dilihat dari faktor budaya hukum tersebut budaya hukum merupakan suatu faktor penting terkait dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat merupakan salah satu masalah atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin, dimana sebagian masyarakat atau para pelaku kesadaran akan hukum sangat minim sehingga penambang pasir tanpa izin yang jelas-jelasnya sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang berisi sanksi-sanksinya secara tegas, secara jelas-jelas tidak diindahkan oleh para penambang pasir tanpa izin.

Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penambang liar galian golongan dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal. Yang mana masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal juga sudah menjadi kebiasaan dalam sekelompok masyarakat

28 Surohmat, (2023), Mafia Hukum Dalam Perspektif Keberlangsungan Dan Penegakkan Hukum. Al-Qisth Law Review, Vol 7 No. 1, Hlm. 43

29 Anis Ari Wibowo, (2017), Peran Hukum Dalam Membentuk Karakter Pancasila Melalui Sarana Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal JOM Untidar, Vol. 3 No. 2, Hlm. 10

30 Zudan Arif Fakrulloh, (2005), "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Hlm. 22-34.

31 Soerjono Soekanto, (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 38

68

dalam wilayah sekitar galian golongan C dalam melakukan penambangan secara ilegal, para pelaku tidak berpikir secara rasional dan sadar akan dampak dan akibat yang ditimbulkan atau yang dialami oleh tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal, sehingga sudah sering menimbulkan korban akibat dari tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal, tetapi masih ada masyarakat atau pelaku yang tidak menjadikan itu sebagai contoh dan pelajaran bagi mereka sehingga masih ada para pelaku yang masih saja melakukan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara ilegal.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan cara mudah dan singkat, hasil penambangan secara ilegal cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar pertambangan pasir sehingga sebagian dari pada masyarakat yang berprofesi sebagai penambang liar masih mempertahankan cara ini demi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari tanpa peduli akan resiko yang akan mereka tanggung apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum atau bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut. Seperti juga laut, hutan juga merupakan suatu ekosistem yang kompleks yang menyediakan cadangan makanan dan tempat untuk hewan-hewan/habitat hutan untuk makan dan bereproduksi, sehingga hutan merupakan suatu tempat kehidupan bagi habitat hutan secara umum. Terkait dengan hal itu, dampak lingkungan hidup akibat tindakan penambangan liar sangatlah berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan hidup, dikarenakan tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan cara penambangan liar yang merusak terhadap struktur dasar lingkungan hidup yang merupakan tempat tinggal dan berkembangnya habitat hutan.

### Similarity 100%

**Title:**[media.neliti.com · media · publicationsNeliti](#)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum...

<https://media.neliti.com/media/publications/26706-ID-pengaruh-budaya-hukum-terhadap-pembangunan-hukum-di-indonesia-kritik-terhadap-le.pdf>

---

### Similarity 50%

**Title:**[BAB 1](#)

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap ... Page 27 ...

[https://eprints.unmas.ac.id/7240/1/R.1882.FH\\_BAB%201.pdf](https://eprints.unmas.ac.id/7240/1/R.1882.FH_BAB%201.pdf)

---

### Similarity 8%

**Title:**[Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman](#)

<https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman>

---

### Similarity 4%

**Title:**

[khoiruumah96.blogspot.com · 2016 · 03Khoiru Umah: SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN - Blogger](#)

Mar 30, 2016 · Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

<https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

---

### Similarity 16%

**Title:**[Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural](#)

Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN ... Syafruddin Makmur. 392 – Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/2387/pdf>

---

### Similarity 6%

**Title:**[PENEGAKAN HUKUM LEGALISTIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS Cecep Wiharma ...](#)

Padahal salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika kita berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk...

<https://media.neliti.com/media/publications/457495-none-c9557bad.pdf>

---

### Similarity 22%

**Title:**[PERAN HUKUM MENGHADAPI POTENSI KERUSAKAN TATANAN MORAL BANGSA](#)

Unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka kita mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya.

[https://www.academia.edu/37159849/PERAN\\_HUKUM\\_MENGHADAPI\\_POTENSI KERUSAKAN\\_TATANAN MORAL\\_BANGSA](https://www.academia.edu/37159849/PERAN_HUKUM_MENGHADAPI_POTENSI KERUSAKAN_TATANAN MORAL_BANGSA)

---

### Similarity 15%

#### Title:Upaya Penegakan Hukum | PDF

Jun 9, 2008 — Di sinilah kita harus bicara soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, the moral of the ...

<https://www.scribd.com/doc/93382667/Upaya-Penegakan-Hukum>

---

### Similarity 9%

#### Title:(DOC) JURMAL JOVI-Peran Hukum | Yuyu Hizza Anisa

Etika dan moral merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam. Pemimpin yang baik harus memiliki moralitas ...

[https://www.academia.edu/37172348/JURMAL\\_JOVI-Peran\\_Hukum](https://www.academia.edu/37172348/JURMAL_JOVI-Peran_Hukum)

---

### Similarity 8%

#### Title:Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap Perilaku ...

Jun 10, 2024 — melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya, ataupun masyarakat. Page 11. Etika Politik... 60 yang tidak memanfaatkan ...

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/download/8436/3077>

---

### Similarity 7%

#### Title:PENEGAKAN HUKUM LEGALISTIK DALAM PERSPEKTIF ...

cenderung untuk menghindari atau menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu yang pada akhirnya bersifat tidak adil bagi masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya ...

[Check](#)

---

### Similarity 5%

#### Title:Rasionalisasi Peran Negara dalam Sistem Pemasarakatan

Apr 11, 2017 — Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik khususnya dalam hal tujuan pemedanaan yang ...

<http://www.ditjenpas.go.id/rasionalisasi-peran-negara-dalam-sistem-pemasyarakatatan>

---

### Similarity 4%

#### Title:SISTEM HUKUM MODERN LAW RANCE M. FRIEDMAN

by I Al Kautsar · 2022 · Cited by 29 — Penjelasan di atas menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Lebih lanjut pada pandangan Friedmen dalam Anajeng,9 ...

<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

---

### Similarity 4%

#### Title:Pengelolaan bahan galian Golongan C oleh Pemerintah Kota ...

by K MERUA · 2007 — ... Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, merupakan petunjuk pelaksana dan sebagai alat ...

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/33800>

---

### Similarity 5%

#### Title:1199 JISOS Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2, No.1, Februari 2023 ...

by F Fathurrahim · 2023 — Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan cara mudah dan singkat, hasil tangkapan yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bom ini ...

<https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/download/4802/3528>

---

**Similarity 2%**

**Title:** BAB I PENDAHULUAN. Sistem kepenjaraan di Indonesia ...





350 31 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 8. 30 4) Faktor masyarakat; yakni lingkungan ...

<https://kudo.tips/edoc/bab-i-pendahuluan-sistem-kepenjaraan-di-indonesia-sebelumnya-menganut-berbagai-perundangan.html>

---

Check By:  Dupli Checker

### Plagiarism Scan Report

 <p><b>17%</b> Plagiarism</p>	 <p>7% Exact Match</p>	 <p><b>83%</b> Unique</p>	<p>Words 358</p>
	 <p>10% Partial Match</p>		<p>Characters 2721</p>
			<p>Sentences 8</p>
			<p>Paragraphs 37</p>
			<p>Read Time 2 minute(s)</p>
			<p>Speak Time 3 minute(s)</p>

### Content Checked For Plagiarism

Berangkat dari hal tersebut diatas maka penulis berkesimpulan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang merupakan ide-ide untuk mewujudkan dan menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka melainkan dukungan dari budaya hukum orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercapainya budaya hukum yang baik, begitu juga sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum dalam masyarakat maka akan berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam masyarakat. Berangkat dari hasil penelitian diatas menurut pendapat penulis tidak efektifnya penegakan hukum terhadap penambang pasir tanpa izin dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan budaya masyarakat / penambang. Penegakan Hukum oleh dinas lingkungan hidup menurut hemat penulis sumber daya manusianya yang masih mini hal ini dapat berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terutama dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan mininya sumberdaya manusia dalam hal teknis Dinas Lingkungan Hidup sendiri merasa sulit untuk bisa cepat memenuhi permintaan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dilihat dari faktor budaya hukum tersebut budaya hukum merupakan suatu faktor penting terkait dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hal inilah merupakan salah satu masalah atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap para penambang pasir tanpa izin.

69

#### KESIMPULAN

Instansi yang berwenang tidak melakukan penindakan terhadap penambang pasir tanpa izin di Kota Ternate dikarenakan instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Lingkungan Kota Ternate sejak proses perizinan sudah tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang ada. Selain proses perizinan ternyata pada pengawasan pun tidak berjalan optimal karena secara normatif Dinas Lingkungan Hidup memang pernah melakukan pengawasan. Sedangkan, upaya penegakan hukum terhadap penambangan galian golongan c tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih mininya sumber daya manusia sehingga penegakan hukum oleh dinas lingkungan hidup tidak berjalan efektif dan minimnya tingkat kesadaran masyarakat

terhadap hukum dan kebiasaan dalam masyarakat penambangan secara ilegal sehingga terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan

## Matched Source

### Similarity 50%

#### Title:

[media.neliti.com](#) · [media](#) · [publications](#) **PENEGAKAN HUKUM LEGALISTIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS Cecep ...**

Faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena perspektif inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan.

<https://media.neliti.com/media/publications/457495-none-c9557bad.pdf>

---

### Similarity 20%

**Title:** [kelemahan teori sistem hukum menurut](#)

<https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/download/447/279>

---

### Similarity 17%

**Title:** [BAB I PENDAHULUAN - UPNVJ](#)

· Nov 29, 2019 · hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. 21 Dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan

<https://repository.upnvj.ac.id/5737/3/BAB%20I.pdf>

---

### Similarity 10%

**Title:** [PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ...](#)

by S Saraya · 2022 · Cited by 3 — Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya aktivitas penambang ...

<https://jfh.uniss.ac.id/index.php/home/article/download/13/12>

---

### Similarity 8%

**Title:** [Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana](#)

Dalam kata lain penyidik harus bisa cepat dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku. Jangka waktu penahanan oleh penyidik paling lama 7 (tujuh) ...

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf>

---